



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Pengantar

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan persoalan penelitian dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Pada bagian ini dikutip pustaka yang menguraikan teori, temuan, gejala, tanda yang menimbulkan gagasan dan dasar bagi penelitian yang diusulkan. Dari pembahasan tersebut akan dibentuk hipotesis-hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini.

B. Telaah Pustaka

1. Agency Theory

Isu penting terkait dengan integritas laporan keuangan adalah *agency theory*. Menurut Jensen dan Meckling (1976:5), definisi dari *agency relationship* adalah:

“As a contract under which one or more persons (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”

Agency theory membahas hubungan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer) serta menggambarkan perusahaan sebagai serangkaian kontrak. Salah satu kontrak utama adalah kontrak pemilik perusahaan sebagai *principal* dengan pihak manajemen sebagai *agent*. *Principal* menyerahkan tugas mengelola perusahaan serta menyediakan fasilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan dana untuk menjalankan perusahaan kepada pihak yang lebih ahli yaitu pihak manajemen, sedangkan *agent* mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diperintahkan pemegang saham kepadanya. Dengan diberikannya kewenangan untuk menjalankan perusahaan kepada *agent*, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penyelewengan kewenangan yang dimiliki oleh *agent* demi kepentingan pribadi daripada kepentingan pemegang saham. Karena pada dasarnya masing-masing pihak dalam perusahaan ingin memaksimalkan kepentingan masing-masing, misalnya pemilik menginginkan *return* setinggi-tingginya, sedangkan pihak manajemen menginginkan kompensasi sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan inilah yang nantinya dapat menimbulkan konflik kepentingan. Konflik ini diselesaikan dengan bertemunya dua kepentingan ini di dalam kesepakatan kontrak yang telah disetujui. Kontrak ini mengikat kedua belah pihak untuk berlaku kooperatif.

Menurut Scott (2009) dalam Oktomegah (2012: 37), terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu:

a. *Adverse selection*

Yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor selaku pihak luar. Informasi mengenai fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tidak disampaikan oleh manajer kepada pemegang saham. *Agent* menggunakan informasi privat yang tidak dapat diverifikasi oleh *principal* untuk mengimplementasikan suatu peraturan atau keputusan yang berbeda dengan yang diinginkan *principal*. Tidak dimilikinya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi oleh *principal* berakibat tidak adanya kemampuan *principal* untuk menentukan apakah *agent* telah mengambil keputusan yang benar.

b. *Moral hazard*

Yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun kreditor. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan di luar sepengetahuan pemegang saham. Muncul ketika terdapat masalah motivasi yang tidak baik dan konflik tercipta akibat mendasarkan kontrak pada itikad yang tidak baik tersebut.

Konflik kepentingan ini memungkinkan munculnya asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan antara informasi yang diketahui oleh *agent* dan *principal*. Ketidakseimbangan distribusi informasi terjadi karena *agent* terlibat langsung di dalam pengelolaan perusahaan sedangkan *principal* tidak terlibat langsung di dalamnya, sehingga *agent* mempunyai informasi yang tidak diketahui oleh *principal*. Konflik kepentingan ini sering kali menyebabkan manipulasi akuntansi oleh pihak manajemen. Pada perkembangannya, konflik tidak hanya terjadi antara pemilik dengan pihak manajemen saja, tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, maupun konflik antara *stakeholder* lainnya.

2. *Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif)

Teori akuntansi positif pertama kali dicetuskan oleh Watts dan Zimmerman dalam dua artikelnya pada tahun 1978 dan 1979 (Sutrisno, 2002:29). Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajer akan memilih metode akuntansi yang paling efisien, sehingga bisa memaksimalkan prospek



mereka untuk kelangsungan hidup. Manajer dalam memilih metode akuntansi akan selalu berpikir rasional dan akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menguntungkan kepentingan manajer. Dengan demikian fleksibilitas yang diberikan oleh teori ini dalam memilih kebijakan akuntansi akan mendukung perilaku oportunistik para manajer.

Sejauh ini, teori akuntansi positif tidak menyarankan agar pihak perusahaan atau pembuat standar akuntansi membuat kebijakan yang harus dipatuhi manajer hingga hal yang paling detail. Pihak manajemen sebaiknya diberikan cukup fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi sehingga mereka dapat beradaptasi dengan keadaan baru. Namun teori inipun mengatakan apabila pihak manajemen diberikan kebebasan seperti itu, mereka akan bersifat oportunistik. Asumsinya adalah manajer bersifatnya rasional (sama seperti investor) dan akan memilih kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan dirinya.

Watts dan Zimmerman (1986: 208) menjelaskan hipotesis yang diaplikasikan dalam teori akuntansi positif untuk memprediksi motivasi manajemen melakukan manajemen laba, yaitu:

(1) Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah, yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi untuk mendapatkan bonus). Jika laba berada di bawah *bogey*,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak ada bonus yang diperoleh manajer, sedangkan jika laba berada di atas *cap*, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih di bawah *bogey* atau di atas *cap*, maka manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya. Jadi manajer akan berusaha menaikkan laba bersih jika laba bersih berada di antara *bogey* dan *cap*.

(2) Hipotesis Perjanjian Hutang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Perusahaan yang mempunyai *debt to equity ratio* yang tinggi, cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan *debt ratio* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditur, bahkan perusahaan terancam dapat melanggar perjanjian hutang. Oleh karena itu, manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat memperbaiki posisi keuangan perusahaan untuk mempengaruhi persepsi kreditur atau investor atas kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat mendapatkan modal tambahan.

(3) Hipotesis Biaya Politis (*Political Cost Hypothesis*)

Perusahaan besar cenderung memilih prosedur akuntansi yang menurunkan laba yang dilaporkan masa kini. Hal ini dilakukan karena sebab-sebab yang bersifat politis, contohnya perusahaan dengan laba sangat tinggi akan menarik perhatian masyarakat yang akhirnya akan mendesak pemerintah untuk menaikkan pajak bagi industri dimana perusahaan bergerak. Perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi juga akan lebih disoroti tanggung jawab sosialnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. *Signaling Theory*

Teori Sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk, Tearney dan Dodd, 2001: 101).

Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Integritas informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis.

Understatement laba dan aktiva bersih yang relatif permanen yang ditunjukkan melalui laporan keuangan merupakan suatu sinyal positif dari manajemen kepada investor bahwa manajemen telah menerapkan akuntansi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

konservatif untuk menghasilkan laba yang berkualitas. Investor diharapkan dapat menerima sinyal ini dan menilai perusahaan dengan lebih tinggi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Laporan Keuangan

a. Definisi Pelaporan Keuangan

Menurut Suwardjono (2008: 101), definisi pelaporan keuangan adalah:

“Struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara.”

Menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concept* No.1 (2008: par 7), pelaporan keuangan adalah:

“Financial reporting includes not only financial statements but also other means of communicating information that relates, directly or indirectly, to the information provided by the accounting system— that is, information about an enterprise’s resources, obligations, earnings, etc.”

FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui sistem keuangan. FASB menyatakan bahwa pelaporan keuangan mencakup pengertian yang luas (tidak hanya laporan keuangan) tentang bagaimana mengkomunikasikan informasi yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi. Informasi yang dikomunikasikan berdasarkan pelaporan keuangan disajikan dalam berbagai bentuk (termasuk laporan keuangan) dan untuk berbagai kepentingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



FASB membedakan antara pelaporan keuangan (*financial reporting*) dan laporan keuangan (*financial statements*). Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari keseluruhan pelaporan keuangan untuk penyajian informasi yang bermanfaat dan relevan. Dengan demikian pelaporan keuangan lebih luas pengertiannya dari laporan keuangan.

b. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2012: par 7), laporan keuangan adalah:

“Bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dengan berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concept* No.1 (2008: par 6), definisi dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Financial statements are a central feature of financial reporting. They are a principal means of communicating accounting information to those outside an enterprise. Although financial statements may also contain information from sources other than accounting records, accounting systems are generally organized on the basis of the elements of financial statements (assets, liabilities, revenues, expenses, etc.) and provide the bulk of the information for financial statements.”

“Laporan keuangan adalah fitur utama dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah sarana utama dalam mengkomunikasikan informasi akuntansi kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Meskipun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan juga mengandung informasi dari sumber lain selain catatan akuntansi, sistem akuntansi pada umumnya diorganisir atas dasar unsur-unsur dalam laporan keuangan (aset, kewajiban, pendapatan, biaya, dll) dan menyediakan sebagian besar informasi untuk laporan keuangan.”

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011:5):

“Financial statements are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. These statements provide a company’s history quantified in money terms. The financial statements most frequently provided are (1) the statement of financial position, (2) the income statement or statement of comprehensive income, (3) the statement of cash flow, and (4) the statement of changes in equity.”

"Laporan keuangan merupakan sarana utama perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar. Laporan ini menyediakan informasi sejarah posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang paling sering diberikan adalah (1) neraca, (2) laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan perubahan ekuitas. "

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang disusun oleh akuntan pada akhir periode akuntansi perusahaan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban pimpinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2012: par 24) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai, yaitu:

(1) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna masa lalu.
- (3) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi harus memiliki kualitas andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
- (4) Dapat Diperbandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2012: par 12), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- (2) laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
- (3) laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

e. Pengguna Laporan Keuangan

Menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concept No.1* (2008: par 24), para pemakai laporan keuangan yaitu pemakai potensial laporan keuangan yang memiliki perhatian khusus secara langsung dengan entitas bisnis dan tertarik dengan kemampuan laporan keuangan untuk meningkatkan arus kas, karena keputusan yang mereka ambil terkait dengan jumlah waktu, dan ketidakpastian atas arus kas yang diharapkan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2012: par 9), pengguna

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Pengguna laporan keuangan tersebut meliputi:

(1) Investor

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

(2) Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja dan kesempatan kerja.

(3) Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

(4) Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama, mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan.

(6) Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

(7) Masyarakat

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Integritas Laporan Keuangan
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Perusahaan biasanya melaporkan laporan keuangan setiap periode tahun buku, baik secara kuartalan, semesteran, maupun tahunan. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik maka dibutuhkan laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi

Menurut Hardiningsih (2010:65), integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Dengan kata lain, integritas laporan keuangan adalah sejauhmana laporan keuangan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Jadi misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Menurut Basu (1997) dan DeFond (1998) dalam Mayangsari (2003:1257) menyatakan bahwa auditor lebih menyukai pelaporan yang konservatif. Apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya), maka peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang *overstate* akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Menurut Mayangsari (2003:1257) ukuran integritas laporan keuangan secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba

Dengan mengacu pada kasus-kasus perusahaan publik di Indonesia yang terkena tindakan penegakan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya integritas laporan keuangan menjadi salah satu penyebab perusahaan publik mendapatkan sanksi hukum. Kesimpulan ini diperoleh dari pengamatan bahwa sebagian besar tindakan penegakan hukum disebabkan pelanggaran yang bersumber dari laporan keuangan, seperti terlambat menyampaikan laporan keuangan, tidak menyampaikan informasi keuangan sesungguhnya serta opini *disclaimer* dari auditor.

a. Konsep Konservatisme

Menurut FASB *Statement of Financial Accounting Concept* No.2 (2008:par 95):

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“*Conservatism is a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risks inherent in business situations are adequately considered.*”

“Konservatisme adalah reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dalam mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko pada situasi bisnis telah dipertimbangkan.”

Suwardjono (2008: 245) menyatakan bahwa konsep konservatisme adalah sikap dasar menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatisme juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Konservatisme sebagai suatu pandangan pesimistik dalam akuntansi. Akuntansi yang konservatif berarti bahwa akuntan bersikap pesimis dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi.

Hendriksen dan Breda (1992:147) menjelaskan beberapa argumen yang mendukung adanya prinsip konservatisme yaitu:

- (1) Asumsi perlunya kecenderungan akuntan untuk bersifat pesimis untuk mengimbangi kecenderungan manajer dan pemilik yang optimis berlebihan. Pada dasarnya seorang wiraswastaan akan optimis atas bisnisnya. Optimisme ini tercermin di dalam pemilihan cara pelaporan dan penekanan dalam pelaporan. Namun adanya tekanan dari kreditor dan pengguna laporan lainnya membuat akuntan di abad ke-19 menghindari pelaporan yang terlalu optimis tersebut, sehingga prinsip konservatisme ini digunakan dan masih berpengaruh hingga saat ini.
- (2) Argumen yang mengatakan bahwa penilaian yang terlalu tinggi (*overstatement*) terhadap laba dan asset jauh lebih berbahaya bagi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bisnis dan pemiliknya dibandingkan penilaian yang terlalu rendah (*understatement*). Konsekuensi dari kerugian atau kebangkrutan jauh lebih serius dibandingkan konsekuensi dari pendapatan.

b. Prinsip Konservatisme

Prinsip konservatisme menurut Wolk, Tearney, Dodd (2001: 144) adalah usaha dalam memilih metode akuntansi yang diterima umum untuk mendapatkan hasil seperti:

- (1) Memperlambat pengakuan *revenues*
- (2) Mempercepat pengakuan *expenses*
- (3) Merendahkan penilaian aktiva
- (4) Meningkatkan penilaian utang

Prinsip konservatisme ini lebih mengutamakan pilihan atau teknik akuntansi yang dapat menunjukkan nilai aktiva dan pendapatan yang lebih rendah namun sebaliknya dapat menunjukkan nilai pasiva dan biaya yang tertinggi apabila dihadapi dengan dua atau lebih pilihan teknik akuntansi yang dapat diterima. Prinsip konservatisme mencerminkan integritas laporan keuangan dari sisi kehati-hatian yang ditunjukkan di dalam pelaporan. Di samping itu prinsip konservatisme juga dapat meredam konflik, perilaku oportunistik manipulasi akuntansi, serta membuat perusahaan dapat bertahan di saat-saat krisis. Konservatisme sendiri identik dengan laporan keuangan yang *understate* yang risikonya lebih kecil daripada laporan keuangan yang *overstate*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



6. Independensi Auditor

a. Definisi Independensi Auditor

Menurut Elder *et al.* (2011: 74) menyatakan pengertian independensi dalam auditing berarti menggunakan sudut pandang tidak bias dalam melaksanakan tes audit, evaluasi hasil audit dan melaporkannya dalam laporan audit. Standar Profesional Akuntan Publik (2011: Seksi 220 par 2) mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun dan akan diragukan keabsahan dari pendapat yang dikeluarkannya. Dengan demikian, akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, jika ia kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya, maka profesinya sebagai auditor tidak akan dapat diterima di masyarakat. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen.

Menurut Etika Kompartemen Akuntan Publik dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011, AE 101) menyatakan bahwa setiap auditor harus mempertahankan integritas, obyektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Sementara auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa independensi adalah istilah yang sering digunakan dalam profesi auditor. Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan objektivitas tugas profesionalnya. Oleh karena itu auditor harus bersikap independen dalam melaksanakan tugasnya agar mendapat kepercayaan bagi para pengguna laporan keuangan.

b. Aspek Independensi

Menurut Elder *et al.* (2011:74) independensi auditor memiliki dua aspek, yaitu:

(1) Independensi dalam fakta/ *Independence in fact*

Independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang ditemui dalam pemeriksaannya dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Independensi dalam penampilan/ *Independence in appearance*

Independensi ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor. *Independence in appearance* berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen, sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi ini berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik

Seorang akuntan publik dapat dikatakan independen, jika dapat menghindarkan faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya independensi akuntan publik tersebut. Menurut Supriyono (1988) dalam Alim, Hapsari dan Purwanti (2007:9), faktor-faktor yang dapat menyebabkan rusaknya independensi akuntan publik tersebut adalah:

(1) Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien

Seorang akuntan publik dapat kehilangan independensinya apabila mereka mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan dengan usaha dengan kliennya. Misalnya, selama perjanjian kerja atau saat menyatakan opininya, akuntan publik memiliki kepentingan keuangan baik langsung maupun tidak langsung yang sifatnya material di dalam perusahaan kliennya. Pemilikan langsung menunjukkan pemilikan saham atau kekayaan lainnya oleh seorang anggota atau anggota keluarga terdekat, sedangkan pemilikan tidak langsung jika ada hubungan pemilikan oleh anggota keluarga yang cukup dekat, tetapi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak langsung antara auditor dengan kliennya. Akuntan publik juga dilarang memiliki saham perusahaan klien yang diauditnya karena akan mengganggu independensi, dan pasti akan mempengaruhi persepsi pemakai laporan keuangan terhadap independensi auditor.

(2) Jasa-jasa Lain Selain Jasa Audit

Apabila akuntan publik memberikan jasa selain jasa audit, misalnya jasa konsultan manajemen, jasa perpajakan, serta jasa akuntansi. Jasa-jasa inilah yang memungkinkan hilangnya independensi akuntan publik, karena dapat memicu seorang akuntan untuk memihak kepada kliennya.

(3) Lamanya Hubungan Penugasan Audit

Jika lebih dari enam tahun maka dianggap dapat mempengaruhi independensi akuntan publik karena hubungan yang penugasan yang lama tersebut.

(4) Ukuran Kantor Akuntan Publik

KAP yang besar akan lebih independen dibandingkan KAP yang kecil karena KAP yang besar tidak hanya bergantung pada satu klien saja.

(5) Audit *Fee*

Besar kecilnya audit *fee* dapat mempengaruhi independensi akuntan publik. Beberapa alasan yang mendasarinya yaitu jika tidak memberikan opini sesuai keinginan kliennya, KAP takut kehilangan kliennya dan KAP yang melakukan audit akan merasa tergantung pada klien sehingga tidak berani menentang keinginan klien yang bertentangan dengan opini audit yang seharusnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Mekanisme *Corporate Governance*

a. Definisi *Corporate Governance*

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* dalam www.iicg.com, *corporate governance* adalah:

“Struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.”

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dalam www.fcgi.or.id :

“*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled. The objective of corporate governance is to create added value to the stakeholders.*”

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)”

Menurut Ujijantho dan Pramuka (2007:6):

“*Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan.”

Berdasarkan beberapa pengertian *good corporate governance* di atas, maka *good corporate governance* adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan pada suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin, dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* yang ada dalam organisasi tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat *Good Corporate Governance* bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2013) mengungkapkan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan menerapkan *good corporate governance*, yaitu:

- (1) Lebih mudah dalam menghimpun modal
- (2) Biaya modal lebih rendah
- (3) Meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi perusahaan
- (4) Meningkatkan nilai saham perusahaan

c. Asas-asas *Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* (2006: 5), setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Asas GCG terdiri dari

(1) *Transparency* (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

d. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan masing-masing pilar adalah (KNKG, 2006:3)

- (1) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
- (2) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
- (3) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.



e. Mekanisme *Corporate Governance*

(1) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme internal *corporate governance*. Menurut Hardiningsih (2010: 66), kepemilikan manajerial adalah presentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk di dalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan yang bersangkutan beserta afiliasinya. Kepemilikan manajerial yang dimaksud adalah dengan memperbesar kepemilikan saham oleh manajer. Karena apabila manajer ikut memiliki perusahaan, maka manajer diharapkan dapat bertindak untuk kepentingan pemilik. Manajemen korporasi publik yang besar biasanya bukan pemilik. Para pemilik (*shareholders*) memilih dewan (komisaris) yang kemudian menggaji manajemen sebagai *agent* mereka dalam menjalankan aktivitas bisnis dari hari ke hari, yang sangat mungkin lebih memperhatikan kesejahteraan mereka sendiri daripada kesejahteraan pemegang saham (Tjager *et al.*, 2003: 25).

Dengan adanya kepemilikan manajerial ini, diharapkan akan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976: 16) menyatakan bahwa konflik keagenan tidak akan terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan 100% oleh manajemen. Menurut teori keagenan (*agency theory*), adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) karena adanya konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dan manajer. Salah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



satu cara mengurangi *agency problem* ini adalah dengan memperbesar kepemilikan saham oleh manajer (kepemilikan manajerial). Manajemen dengan kontrol kepemilikan besar memiliki insentif yang lebih rendah untuk melakukan *self-serving behavior* yang tidak meningkatkan nilai perusahaan dan bisa jadi memiliki lebih banyak kecenderungan untuk menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme untuk meningkatkan kualitas laba (Fala, 2007:8). Sama halnya ketika terdapat tekanan dari pasar modal yang menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, di mana hal ini tidak mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan yang bersangkutan.

(2) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak mudah diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer. (Bushee, 1998 dalam Madiastuty dan Machfoedz, 2003: 179). Tindakan pengawasan dilakukan manajemen melalui berbagai hak yang diperoleh dari besarnya persentase saham yang dimilikinya.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen

Cornett, Marcus, dan Tehranian (2008: 372) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa praktik *corporate governance* dengan melakukan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Mereka menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional tidak akan mudah diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer dan dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

(3) Komisaris Independen

Model *board structure* perusahaan-perusahaan di Inggris dan Amerika berbasis *One Tier System* atau *Single Board System*, dimana keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi tidak terpisah. Dalam model ini, anggota dewan komisaris juga merangkap sebagai anggota dewan direksi dan kedua dewan ini dikenal sebagai *Board of Directors*. Sedangkan kebanyakan negara- negara di Eropa seperti Denmark, Jerman, dan Belanda menggunakan model *Two Tier* atau *Two board System*. Menurut Tjager *et al.* (2003: 178), Indonesia mengenal sistem *two tier* atau *Two board System* dimana fungsi untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjalankan perusahaan dipegang oleh dewan direksi terpisah dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris diangkat dan diganti melalui RUPS. Dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan (KNKG 2006: 12).

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan dan wakil dari pemegang saham di dalam perusahaan, bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta mengambil keputusan operasional.

Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, yang dikenal sebagai komisaris independen, dan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengedali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



anggota direksi serta karyawan perusahaan untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

Menurut Susiana dan Herawaty (2007: 9), komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Salah satu syarat komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan/ atau keuangan.

Menurut OECD (2004: 60), tugas dewan komisaris antara lain:

- (a) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis- garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, serta menetapkan sasaran kerja. Mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan asset.
- (b) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
- (c) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(d) Memonitor pelaksanaan *corporate governance* dan mengadakan perubahan dimana perlu.

(e) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Jumlah dewan komisaris independen minimum 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Kriteria komisaris independen berdasarkan Keputusan Direksi PT BEJ Kep-305/BEJ/07-2004 adalah sebagai berikut:

- (a) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- (b) Tidak memiliki hubungan dengan direktur dan atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- (c) Tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang berafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- (d) Harus mengerti peraturan perundang-undangan di pasar modal.

(4) Dewan Direksi

Dalam Ratna Wardhani (2006:4) dikatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh mengelola perusahaan. Masing-masing anggota dewan direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



umum, dewan direksi ditugaskan dan diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan direksi. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Adapun tanggung jawab direksi (KNKG, 2006:19) meliputi:

- (a) Direksi harus menyusun pertanggung jawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan *good corporate governace*.
- (b) Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS untuk laporan tahunan, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.
- (c) Direksi harus telah menyediakan laporan tahunan sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kemungkinan pemegang saham melakukan penilaian.
- (d) Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (e) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS, dimana hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas *good corporate governance*.

Agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dapat berjalan secara efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: (KNKG 2006: 17)

- (a) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- (b) Direksi harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- (c) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- (d) Direksi mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kualitas Audit

Laporan keuangan yang disampaikan kepada BAPEPAM merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Auditor yang berkualitas tinggi harus memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (2011) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar umum yang kedua mengatur sikap mental independen auditor dalam tugasnya. Standar umum yang ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Sedemikian pentingnya suatu laporan akuntansi yang dikeluarkan auditor mengenai transparansi perusahaan kepada publik, maka diperlukan suatu audit yang memadai agar tidak terjadi tuntutan hukum di kemudian hari mengenai penyalahgunaan kontrak ataupun kebohongan publik lainnya. Adanya kasus-kasus yang melibatkan manipulasi akuntansi di dalam perusahaan besar di Amerika Serikat menunjukkan semakin perlunya suatu kualitas audit yang memadai dengan ditunjang keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya

Mayangsari (2004: 155) menyatakan bahwa klien beranggapan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam kategori *Big Four* dan mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas. Selain diukur dengan kategori *Big Four* dan *Non Big Four*, spesialisasi auditor pada bidang tertentu juga merupakan dimensi lain dari kualitas audit. Auditor spesialisasi industri akan lebih mungkin melakukan investasi dalam hal pelatihan karyawan dan teknologi yang terkait untuk mengaudit di industri yang sesuai dengan keahlian mereka. Perusahaan yang bergerak dalam industri khusus akan memberikan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



insentif yang lebih tinggi pada auditor spesialis atas kualitas audit yang telah diberikan

Auditor yang termasuk dalam spesialisasi industri menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Auditor yang berkualitas tinggi memberikan kepastian yang besar terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Menurut Owhoso (2002) dalam Steven Balsam *et al.* (2003: 5), auditor dapat lebih cepat dalam mendeteksi kesalahan yang ada pada spesialisasi industrinya dibanding di luar spesialisasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa auditor spesialis dapat lebih singkat dalam menyelesaikan audit dibanding dengan auditor tidak spesialis melaksanakan tugas audit. Bagi seorang auditor selain harus mengikuti pendidikan tertentu juga harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugasnya, karena dengan pengalaman memberikan keahlian dan keterampilan kepada auditor dalam melaksanakan tugas audit. Pengalaman yang diperoleh oleh seorang auditor akan bisa meningkatkan keahlian dan ketrampilan dalam melakukan pemeriksaan yang erat kaitannya dengan keahlian atau profesionalisme seorang auditor

Mayangsari (2004:157) yang menggunakan spesialisasi industri auditor dalam menilai kualitas audit suatu perusahaan sesuai dengan peneliian Allen T. Craswell *et al.* (1995). Auditor yang memiliki kien di atas 15% dalam suatu industri minimal 30 perusahaan, akan dikatakan memiliki spesialisasi industri auditor. Auditor yang demikian akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang industri yang di audit (seperti risiko, siklus, akun-akun yang kritikal untuk diaudit dan dijadikan pedomana atas audit). Pemahaman yang lebih baik oleh auditor spesialisasi selanjutnya akan meningkatkan kredibiitas angka akuntansi yang dilaporkan setelah diaudit, dan selanjutnya kredibilitas angka

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba dalam laporan keuangan yang telah diaudit akan meningkatkan integritas laporan keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

9. *Financial Distress* (Kesulitan Keuangan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Brigham dan Daves (2003) dalam Fachrudin (2008: 2), kesulitan keuangan (*financial distress*) dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. *Financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan. Kondisi *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. McCue (1991) mendefinisikan *financial distress* sebagai arus kas negatif. Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan *financial distress* sebagai perubahan harga ekuitas, Lau (1987) dan Hill *et al.* (1996) mengatakan bahwa perusahaan mengalami *financial distress* jika melakukan pemberhentian karyawan atau menghilangkan pembayaran deviden (Widarjo dan Setiawan, 2009: 109). Kesehatan suatu perusahaan akan mencerminkan kemampuan dalam menjalankan usahanya, distribusi aktiva, keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha yang telah dicapai, kewajiban yang harus dilunasi dan potensi kebangkrutan yang akan terjadi. Masalah keuangan yang dihadapi suatu perusahaan apabila dibiarkan berlarut-larut dapat mengakibatkan terjadinya kebangkrutan. Beberapa perusahaan yang mengalami masalah keuangan mencoba mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pinjaman dan penggabungan usaha, atau sebaliknya ada yang menutup usahanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Brigham dan Gapenski (1997) dalam Fachrudin (2008: 2), ada beberapa definisi kesulitan keuangan, sesuai tipenya, yaitu:

a. *Economic failure*

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk *cost of capital* nya. Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur mau menyediakan modal dan pemiliknya mau menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) di bawah pasar. Meskipun tidak ada suntikan modal baru saat aset tua sudah harus diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara ekonomi.

b. *Business failure*

Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditor.

c. *Technical insolvency*

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *technical insolvency* jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya dan *survive*. Di sisi lain, jika *technical insolvency* adalah gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin menjadi perhentian pertama menuju bencana keuangan (*financial disaster*).

d. *Insolvency in bankruptcy*

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *insolvent in bankruptcy* jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



daripada *technical insolvency* karena, umumnya, ini adalah tanda *economic failure*, dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis. Perusahaan yang dalam keadaan *insolvent in bankruptcy* tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum.

e. Legal bankruptcy

Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang

Menurut Long dan Evenhouse (1989) dalam Nur (2007:90) , menemukan bahwa faktor-faktor penyebab *financial distress* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu kondisi ekonomi secara makro, kebijakan industri dan finansial, dan perilaku debitor serta kreditor. Kondisi *financial distress* menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak sehat, sehingga akan mempengaruhi keputusan investasi dari seorang investor. Para investor cenderung melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat, karena perusahaan yang sehat keuangannya cenderung dapat mengembalikan keyakinan dan kemampuannya dalam memberikan tingkat pengembalian investasi yang baik, melunasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya tepat waktu dan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membagikan deviden. Foster (1986) dalam Nur (2007:90) menyebutkan paling tidak ada empat analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan yaitu analisis *cash flow*, analisis strategi perusahaan, analisis laporan keuangan dan analisis variabel eksternal.

Lizal (2002) dalam Fachrudin (2008: 6) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan dan menamainya dengan Model Dasar Kebangkrutan atau

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan. Menurut beliau, ada tiga alasan yang mungkin mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu:

a. *Neoclassical model*

Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran *asset* yang salah. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan laporan laba rugi. Misalnya *profit/assets* (untuk mengukur profitabilitas), dan *liabilities/assets*.

b. *Financial model*

Campuran *asset* benar tapi struktur keuangan salah dengan *liquidity constraints* (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan struktur modal yang *inherited* menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan indikator keuangan atau indikator kinerja seperti *turnover/total assets*, *revenues/turnover*, ROA, ROE, *profit margin*, *stock turnover*, *receivables turnover*, *cash flow/ total equity*, *debt ratio*, *cash flow/(liabilities-reserves)*, *current ratio*, *acid test*, *current liquidity*, *short term assets/daily operating expenses*, *gearing ratio*, *turnover per employee*, *coverage of fixed assets*, *working capital*, *total equity per share*, *EPS ratio*, dan sebagainya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. *Corporate governance model*

Disini, kebangkrutan mempunyai campuran *asset* dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi *out of the market* sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.

Lo (2005: 400) menyatakan bahwa teori akuntansi positif memprediksi bahwa tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaan memicu tindakan perbaikan manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Tindakan perbaikan manajemen dapat memulihkan dan memperbaiki nilai pasar *industry adjusted* perusahaan kesulitan keuangan bila kesulitan keuangan tersebut disebabkan manajemen yang buruk, tetapi tidak bila kesulitan tersebut disebabkan *economic distress*. Jika perusahaan mengalami *financial distress*, manajer sebagai agen dapat dianggap akan melanggar kontrak. Kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah diakibatkan oleh kualitas manajer yang buruk. Keadaan tersebut dapat memicu pemegang saham melakukan penggantian manajer, yang kemudian dapat menurunkan nilai pasar manajer di pasar tenaga kerja. Ancaman tersebut dapat mendorong manajer menurunkan tingkat konservatisme akuntansi.

Teori signaling menjelaskan bahwa jika kondisi keuangan dan prospek perusahaan baik, manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi liberal yang tercermin dalam akrual diskresioner positif untuk menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan laba perioda kini serta yang akan datang lebih baik daripada yang diimplikasikan oleh laba non-diskresioner perioda kini. Jika perusahaan dalam kesulitan keuangan dan mempunyai prospek buruk, manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



konservatif yang tercermin dalam akrual diskresioner negatif untuk menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan laba perioda kini serta yang akan datang lebih buruk daripada laba non-diskresioner perioda kini. Dengan demikian, tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme akuntansi, dan sebaliknya (Lo 2005: 400).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

10. Penelitian Terdahulu

- a. Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan
- Nama Peneliti : Sekar Mayangsari
- Tahun Penelitian : 2003
- Variabel : Konservatisme, independensi, kualitas audit (Ukuran KAP), keberadaan komite audit, jumlah komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional
- Cara Pengujian : Model *C score*, regresi linear berganda
- Kesimpulan : - Pada kelompok sampel pertama, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan lamanya hubungan *auditor-auditee* signifikan berpengaruh positif terhadap konservatisme. Sedangkan komite audit signifikan berpengaruh negatif dan kualitas audit serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

spektrum jasa tidak signifikan berpengaruh terhadap konservatisme.

- Pada kelompok sampel kedua, kualitas audit, kepemilikan institusional, lamanya hubungan *auditor-auditee* signifikan berpengaruh positif terhadap konservatisme. Sedangkan kepemilikan manajerial, komisaris independen dan spektrum jasa signifikan berpengaruh negatif terhadap konservatisme. Serta komite audit tidak signifikan berpengaruh terhadap konservatisme.

- b. Judul Penelitian : Analisis Hubungan Mekanisme *Corporate Governance* Dan Indikasi Manajemen Laba.
- Nama Peneliti : Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz
- Tahun Penelitian : 2003
- Variabel : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, manajemen laba, kualitas laba
- Cara Pengujian : Model Modified Jones, model regresi linear berganda
- Kesimpulan : - Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional signifikan negatif terhadap manajemen laba sedangkan ukuran dewan direksi signifikan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

-kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

- c. Judul Penelitian : Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap konservatisme Akuntansi
- Nama Peneliti : Eko Widodo Lo
- Tahun Penelitian : 2005
- Variabel : Kesulitan Keuangan dan konservatisme
- Cara Pengujian : Model Lo, *Ordinary Least Square*
- Kesimpulan : - Kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi
- d. Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme *Corporate Governance*, Dan Kualitas Audit Terhadap integritas Laporan Keuangan
- Nama Peneliti : Susiana Arleen Herawaty
- Tahun Penelitian : 2007
- Variabel : Konservatisme, independensi (*fee audit*), kualitas audit (ukuran KAP), komite audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional
- Cara Pengujian : Model *Cscore*, regresi linear berganda
- Kesimpulan :- Independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan pada penelitian tahun 2000, 2001, 2002.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- Independensi berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan pada penelitian tahun 2003.
- Mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan pada penelitian tahun 2000 dan 2001.
- Mekanisme *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan pada penelitian tahun 2002 dan 2003.
- Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan tahun 2000-2003.

e. Judul Penelitian : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan

Nama Peneliti : Desi Efrianti

Tahun Penelitian : 2012

Variabel : Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, konservatisme

Cara Pengujian : Model *Cscore*, regresi linear berganda

Kesimpulan : -kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan



C. Kerangka Pemikiran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara independensi auditor, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, kualitas audit, dan *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya akan ditetapkan hipotesis yang menjadi dasar dari kerangka berpikir penulis dalam melakukan penelitian ini.

a. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan

Independensi merupakan aspek penting bagi profesionalisme akuntan khususnya dalam membentuk integritas pribadi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pelayanan jasa akuntan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan klien maupun publik secara luas dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Seorang auditor yang memiliki independensi tinggi maka kinerjanya akan menjadi lebih baik.

Munculnya kasus manipulasi akuntansi seperti *Enron*, *Tyco*, dan *Global Crossing* memicu terbitnya Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-310/BL/2008 per tanggal 14 Februari 2008. Pada lampiran, terdapat Peraturan nomor VIII.A.2 yang berisi independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Peraturan tersebut diantaranya membatasi hubungan antara *auditee* dan *auditor* selama jangka waktu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tertentu, yaitu emiten harus menggati kantor akuntan setiap 6 tahun dan setiap 3 tahun untuk auditor. Selain itu, tidak diperkenankan memberikan jasa bukan audit pada klien, seperti menjadi konsultan pajak, konsultan manajemen di samping pemberian jasa audit kepada seorang klien karena dapat mengganggu independensi auditor.

Penelitian Mayangsari (2003), selain lamanya hubungan antara auditee-auditor, juga menggunakan spektrum jasa yang dilakukan *auditor* terhadap *auditee* sebagai proksi independensi. Sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan proksi tersebut karena hasil yang didapat oleh Mayangsari dalam penelitiannya tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian ini menggunakan masa kerja atau hubungan antara *auditee-auditor* sebagai proksi yang dapat digunakan untuk mengukur independensi auditor. Semakin lama hubungan antara *auditee-auditor* maka terdapat potensi terjadinya kecurangan yang juga semakin meningkat. Hubungan yang terjalin baik antara *auditee-auditor* dapat menyebabkan salah satu pihak menyalahgunakan otorisasi yang dimilikinya untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Metcalf Committee (1977) dalam Mayangsari (2003: 1258) menyatakan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan klien dapat merusak kualitas profesionalisme auditor. Rusaknya kualitas profesionalisme auditor akan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak berintegritas. Dengan demikian diduga bahwa semakin auditor tidak independen, maka probabilitas (peluang) perusahaan menyajikan laporan keuangan yang berintegritas akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mayangsari (2003).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Jensen dan Meckling (1976: 16), kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik. Kepemilikan manajemen yang rendah akan menimbulkan kecenderungan terjadinya perilaku *oportunistic* manajer yang meningkat. Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara *agent* dan *principal* diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Yang pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan demikian diduga bahwa kepemilikan manajerial yang semakin besar dalam suatu perusahaan, maka kemungkinan perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berintegritas akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Putra dan Muid (2012,4) dan didukung hasil penelitian Mayangsari (2003).

c. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan

Bushee dalam Midiastuty dan Machfoedz (2003: 179) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sebagai investor yang *sophisticated*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga dapat melakukan fungsi *monitoring* secara lebih efektif dan tidak mudah diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer. Investor institusional juga termasuk investor yang terdidik, maka akan menerapkan pengendalian yang lebih konservatif. Ujiyantho dan Pramuka (2007:6) menyatakan bahwa adanya konsentrasi kepemilikan dari institusi yang merupakan salah satu mekanisme eksternal dari *corporate governance* dianggap bisa mengurangi kecenderungan manajer dalam memanipulasi laba. Investor institusional dianggap dapat melakukan fungsi pemantauan yang lebih efektif dan tidak mudah diperdaya sehingga dianggap lebih memiliki informasi tentang perusahaan sehingga dapat melakukan fungsi pemantauan yang lebih efektif dibandingkan dengan investor individu. Dengan demikian diduga bahwa kepemilikan saham oleh pihak institusional yang semakin tinggi, maka laporan keuangan akan disajikan lebih berintegritas. Hal ini sesuai dengan penelitian Warfield et al., (1995), Dhaliwal et al., (1982) dalam Hardiningsih (2012, 70) serta Linata dan Sugiarto (2012).

d. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Dari sudut pandang komisaris independen mengindikasikan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan (Beasley (1996) dalam Midiastuty dan Machfoedz, 2003:6). Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak di luar manajemen perusahaan (Susiana dan Herawaty 2007: 7). Dengan demikian diduga bahwa semakin tinggi komisaris independen dalam perusahaan, maka kemungkinan bahwa laporan keuangan disajikan secara lebih berintegritas akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Efrianti (2012).

e. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Integritas Laporan Keuangan

Dalam mengelola dan mengawasi kinerja perusahaan, dewan direksi sebagai pengelola perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan di dalam perusahaan seperti kebijakan mengenai penerapan akuntansi konservatif. Menurut Chtourou *et al.*(2001) dalam Midiastuty dan Machfoedz (2003:179) yang mengindikasikan bahwa ukuran dewan direksi yang besar dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan direksi yang kecil, sehingga laporan keuangan lebih berintegritas. Dengan demikian, diduga bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian Linata dan Sugiarto (2012).

f. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Karakteristik suatu industri mempengaruhi suatu perusahaan, sehingga untuk bisa mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut, maka diperlukan keahlian tertentu dari auditor untuk bisa mendeteksinya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Seseorang dapat mempertimbangkan fakta dengan baik jika mempunyai keahlian mengenai audit atas fakta tersebut. Definisi keahlian dalam bidang *auditing* pun sering diukur dengan pengalaman. Keahlian merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara baik dengan hasil yang maksimal. Keahlian yang dimiliki auditor yang diperoleh dari pendidikan formal dan *non* formal harus terus menerus ditingkatkan. Salah satu sumber peningkatan keahlian auditor dapat berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui proses yang bertahap, seperti pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keahlian auditor.

Pada penelitian Craswell (1995) dalam Mayangsari (2003:1259) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor pada bidang tertentu merupakan dimensi lain dari kualitas, penelitiannya juga menunjukkan bahwa *fee* audit yang diterima oleh auditor spesialis lebih besar dari auditor *non* spesialis. Penelitian Hogan dan Jeter (1999) dalam Mayangsari (2003: 1259). menyatakan bahwa spesialisasi industri membuat auditor mampu menawarkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak spesialisasi. Misalnya, seorang auditor yang tidak memiliki pengetahuan mengenai bisnis asuransi, tidak akan mempertimbangkan dengan objektif informasi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan asuransi. Auditor tersebut tidak memiliki independensi bukan karena tidak adanya kejujuran dalam dirinya, melainkan karena tidak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

adanya keahlian mengenai obyek yang diauditnya. Kompetensi auditor menentukan independensi atau tidaknya auditor tersebut dalam mempertimbangkan fakta yang diauditnya. Hal ini menunjukkan bahwa spesialisasi dalam industri dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan demikian, diduga bahwa kualitas audit berpengaruh positif dengan integritas laporan keuangan. Penentuan arah positif didukung oleh hasil penelitian Putra dan Muid (2012).

g. Pengaruh *Financial Distress* terhadap Integritas Laporan Keuangan

Lo (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme. Teori *signaling* menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer menyelenggarakan akuntansi konservatif atau akuntansi liberal yang tercermin dalam *akrual diskresioner* untuk menyampaikan informasi *private* mengenai kemampuan perusahaan yang akan datang, atau agar laba menjadi ukuran yang lebih dapat dipercaya dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan kini daripada laba *non-diskresioner*.

Teori *signaling* ini bisa diasumsikan bahwa pemberian informasi yang mengakui adanya laba yang rendah dapat membantu mengurangi adanya konflik antara manajer dan pemegang saham, karena manajer dengan teori ini berusaha menyampaikan informasi secara jujur dengan penuh kehati-hatian. Konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian maka dengan adanya kesulitan keuangan maka perusahaan akan lebih berhati-hati lagi dalam menghadapi lingkungan yang tidak pasti ini dengan cara menyediakan laporan keuangan yang berintegritas. Dengan demikian,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

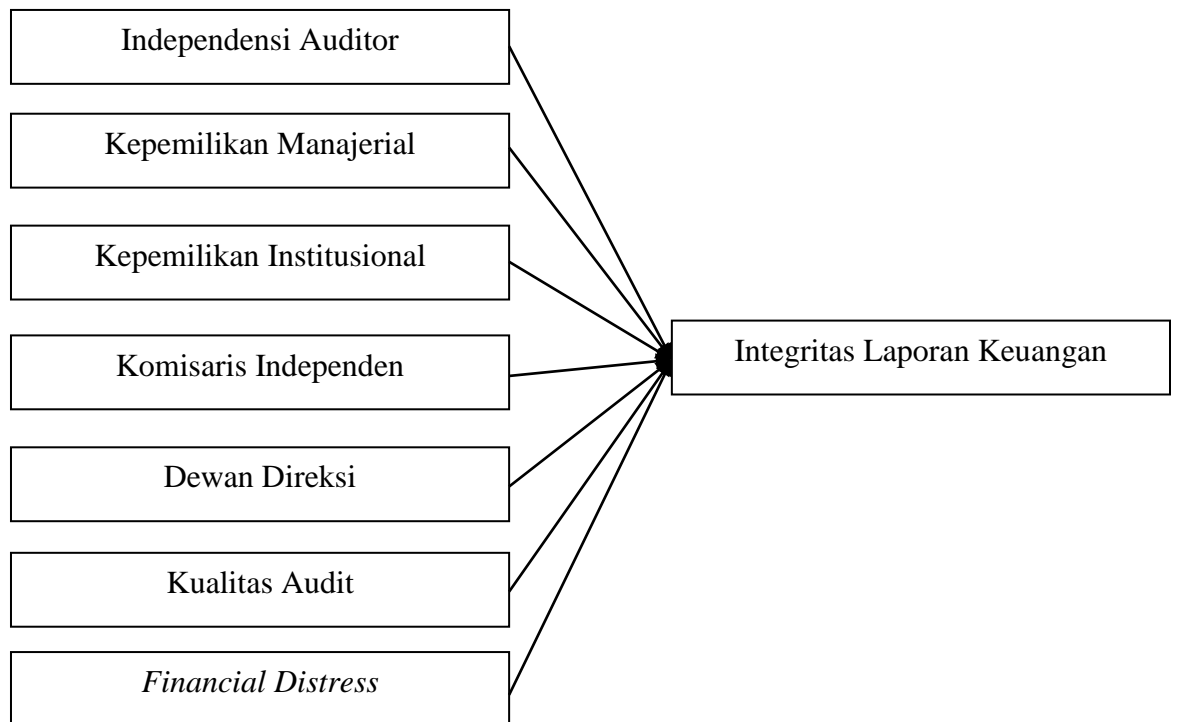
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme akuntansi yang mencerminkan laporan keuangan yang lebih berintegritas. Hal ini sesuai dengan penelitian Lo (2005) dan Pramudita (2012).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D Hipotesis Penelitian

- H1 : Semakin tidak independen auditor maka integritas laporan keuangan semakin menurun.
- H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan
- H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





H4 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

H5 : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

H6 : Semakin tinggi kualitas audit maka integritas laporan keuangan semakin meningkat

H7 : Semakin tinggi *financial distress* maka integritas laporan keuangan semakin meningkat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.